



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Rangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 tercantum Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS”. guna pencapaian kinerja dari instansi Pemerintah maka dimulai penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan Rencana Kerja (Rancangan RENJA) yang didisain melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD.

Adapun muatan dalam rancangan Renja sebgaimana yang tertuang dalam Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 adalah :

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RKPD tahun lalu
2. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan
3. Indikator indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD
4. Dana Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan Pagu Indikatif

4.2



Landasan Hukum

Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017 disusun dengan mempedomani :

1. Undang – undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor : 42867
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. UU Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Republik indonesia Tahun 2005 Nomor : 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 45487);
4. PP Nomor : 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencanana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor:38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Rencana Pemerintah Tahun 2011
7. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019



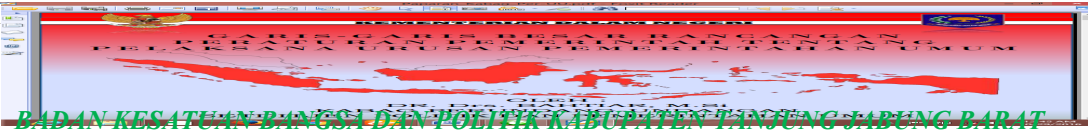
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
10. Permendagri Nomor : 22 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2013
11. Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025
13. Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor:2 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021

13.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017 adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai Rancangan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1(satu) tahun anggaran

Tujuan



Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017 adalah sebagai bahan masukan awal penyusunan Rancangan Rencana Kinerja Pembangunan Daerah

13.4 Sistematika

Sistematika Renja Badan Kesbang Pol disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 13.1 Latar Belakang
- 13.2 Landasan Hukum
- 13.3 Maksud dan Tujuan
- 13.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

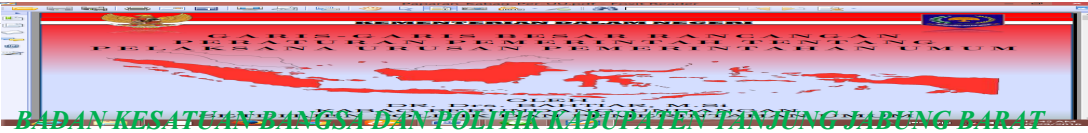
- 13.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015
- 13.2 Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016
- 13.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 13.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 13.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 13.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 13.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 13.2 Tujuan dan Sasaran Renja Renja SKPD
- 13.3 Sasaran dan Indikator SKPD
- 13.4 Program dan Kebijakan

BABIV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Tabel

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesbang Pol Kab. Tanjung Barat pada Tahun 2016 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kab. Tanjung Barat. Adapun Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sampai dengan Triwulan ke IV tahun 2015 sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2015 setelah melalui perubahan Anmggaran dan tertuang dalam DPA-Perubahan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat menyurat

– Anggaran tersedia dalam DPA	:	Rp. 2.400.000
– Realisasi	:	Rp. 2.400.000
– Prosentase Realisasi	:	100 %

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

– Anggaran	:	Rp. 28.800.000
– Realisasi	:	Rp. 23.564.697
– Prosentase Realisasi	:	81,82 %



c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

– Anggaran	:	Rp. 107.600.000
– Realisasi	:	Rp. 107.600.000
– Prosentase Realisasi	:	100 %

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

– Anggaran	:	Rp. 1.008.500
– Realisasi	:	Rp. 1.008.500
– Prosentase Realisasi	:	100%

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

– Anggaran	:	Rp. 32.778.500
– Realisasi	:	Rp. 32.776.300
– Prosentase Realisasi	:	99,99 %

f. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan

– Anggaran	:	Rp. 11.017.500
– Realisasi	:	Rp. 9.499.000
– Prosentase Realisasi	:	86,21 %

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

– Anggaran	:	Rp. 2.300.000
– Realisasi	:	Rp. 2.300.000
– Prosentase Realisasi	:	100%

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

– Anggaran	:	Rp. 6,000,000
– Realisasi	:	Rp. 6,000,000



– Prosentase Realisasi : 100%

i. Penyediaan Makanan dan Minuman

– Anggaran : Rp. 4.200.000

– Realisasi : Rp. 4.200.000

– Prosentase Realisasi : 100 %

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

– Anggaran : Rp. 181.625.000

– Realisasi : Rp. 118.299.653

– Prosentase Realisasi : 65,13%

k. Penyediaan Jasa Administrasi/ Tekhnis Perkantoran

– Anggaran : Rp. 72.000.000

– Realisasi : Rp. 72.000.000

– Prosentase Realisasi : 100 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

– Anggaran : Rp. 37.500.000

– Realisasi : Rp. 36.500.000

– Prosentase Realisasi : 97,13 %

b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

– Anggaran : Rp. 142.040.000

– Realisasi : Rp. 133.599.851

– Prosentase Realisasi : 94,06 %

c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

– Anggaran : Rp. 7.400.000

– Realisasi : Rp. 5.100.000



– Prosentase Realisasi : 68,92%

d. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

– Anggaran : Rp.9.450.000

– Realisasi : Rp.9.300.000

– Prosentase Realisasi : 98,41%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

– Anggaran : Rp. 12.750.000

– Realisasi : Rp. 12.530.000

– Prosentase Realisasi : 98,27%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Bimbingan Teknis

– Anggaran : Rp. 1.500.000

– Realisasi : Rp. 1.500.000

– Prosentase Realisasi : 100 %

5. Program Peningkatan system pelaporan capaian kinerja

– Anggaran : Rp. 53.340.000

– Realisasi : Rp. 53.340.000

– Prosentase Realisasi : 100 %

6. Program Bina Ideologi Pengawasan kebangsaan.

a. Koordinasi Kegiatan Orang Asing, LSM (NGO) dan
Lembaga Asing di Daerah

– Anggaran : Rp. 97.140.000

– Realisasi : Rp. 73.647.200

– Prosentase Realisasi : 75,82 %



b. Penanganan Gangguan Keamanan

– Anggaran	:	Rp. 148.300.000
– Realisasi	:	Rp. 78.655.000
– Prosentase Realisasi	:	53,04 %

c. Komunitas Intelelijen Daerah Kominda

– Anggaran	:	Rp. 275.805.000
– Realisasi	:	Rp. 233.918.095
– Prosentase Realisasi	:	84,81 %

d. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

– Anggaran	:	Rp. 135.190.000
– Realisasi	:	Rp. 130.551.000
– Prosentase Realisasi	:	96,57 %

7. Program ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam beragama

– Anggaran	:	Rp. 241.976.600
– Realisasi	:	Rp. 241.904.300
– Prosentase Realisasi	:	99,97 %

b. Sosialisasi Permendagri No.20 Tahun 2013 Tentang
Ketahanan Seni dan Budaya

– Anggaran	:	Rp. 16.200.000
– Realisasi	:	Rp. 16.200.000
– Prosentase Realisasi	:	100 %

c. Forum diskusi penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan

– Anggaran	:	Rp. 78.116.000
– Realisasi	:	Rp. 78.113.600



– Prosentase Realisasi : 100 %

d. Pembinaan Lembaga Swadya Masyarakat dan Organisasi

Masyarakat

– Anggaran : Rp. 117.370.000

– Realisasi : Rp. 117.170.000

– Prosentase Realisasi : 99,83 %

e. Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tanjung Jabung Barat

– Anggaran :
Rp. 160.964.400

– Realisasi :
Rp. 160.822.300

– Prosentase Realisasi :
99,91 %

f. Rakor Kegiatan Ekonomi Tingkat Kabupaten

– Anggaran : Rp. 67.279.000

– Realisasi : Rp. 67.276.500

– Prosentase Realisasi : 99,99 %

8. Pembinaan Politik Masyarakat

a. Tim Penilai dan Pemeriksa Administrasi Keuangan Parpol

– Anggaran : Rp. 67.554.000

– Realisasi : Rp. 67.315.700

– Prosentase Realisasi : 99,65 %

b. Pemantapan dalam rangka Rencana Pemilu



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT

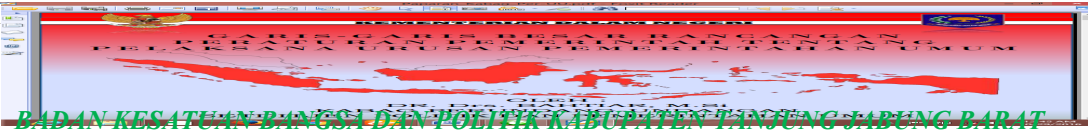
- Anggaran : Rp. 201.564.700
 - Realisasi : Rp. 198.828.700
 - Prosentase Realisasi : 98,64 %
- c. Pembinaan Pendidikan Politik Masyarakat
- Anggaran : Rp. 63.669.040
 - Realisasi : Rp. 63.653.500
 - Prosentase Realisasi : 99,98 %
- d. Tim Perkembangan Politik Daerah
- Anggaran : Rp. 463.833.500
 - Realisasi : Rp. 461.742.081
 - Prosentase Realisasi : 99,55%

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat yang di akomodir dalam DPA murni dan setelah adanya DPA perubahan telah mencapai hasil kinerja 100 %. Sedangkan Prosentase realisasi keuangan sebesar Rp.2.621.255.977.- (93,46%)

Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini masih

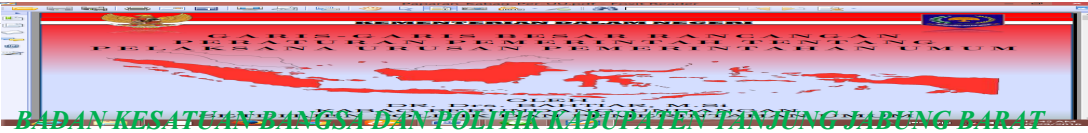


terdapat realisasi program dari Badan Kesbang Pol Kab. Tanjung Barat yang belum/tidak mencapai 90% dikarenakan adanya pengurangan anggaran dan lamanya proses APBD-P, proses perubahan Anggaran dan adanya pengurangan anggaran setelah terjadinya Defisit Anggaran mengakibatkan keterlambatannya pengesahan perubahan dokumen pelaksana anggaran Perubahan (DPA- Perubahan)

- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesbang Pol Kab. Tanjung Barat sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi terhadap sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Badan Kesbang Pol Kab. Tanjung Barat.
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut. Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/Kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut.

Adapun capaian Renstra Tahun yang berlalu adalah :

1. Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi perkantoran dengan capaian program/kegiatan merupakan tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor dan kesejahteraan pegawai
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasana aparatur dengan output kegiatan memenuhi kebutuhan perlengkapan sarana dan prasarana aparatur dalam meningkatkan kinerja pegawai.



3. Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai capaian program/kegiatan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam berpakaian.
4. Terwujudnya sumber daya manusia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat pendidikan dan latihan untuk meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya
5. Tertatanya sistem Pelaporan dan keuangan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan perencanaan, realisasi program Kesbang dan Politik. Dengan output pembuatan laporan, prognosis, usulan program, evaluasi kegiatan, perhimpunan peraturan perUndang-undangan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5.5 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Predeksi tahun 2017

adapun program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2017 mengacu pada program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016 antara lain :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Adapun kegiatan – kegiatan dalam program ini antara lain :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan



- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Adapun kegiatan – kegiatan dalam program ini antara lain :

- a. Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Adapun kegiatan dalam program ini adalah Bimbingan teknis/Penembangan SDM

4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

- Monitoring Evaluasi dan pelaporan

5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Adapun kegiatan – kegiatan dalam program ini antara lain :

- a. Koordinasi kegiatan orang asing LSM (NGO) dan lembaga Asing di Daerah
- b. Penanganan Gangguan Keamanan

6. Program pengembangan wawasan kebangsaan

- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

7. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

- Forum diskusi penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan

8. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

- a. Komonitas Inteligen Daerah (Kominda)
- b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

9. Program Pendidikan Politik

- a. Tim Penelitian dan pemeriksaan administrasi keuangan



Parpol

- b. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM
 - c. Pembinaan pendidikan Politik Masyarakat
 - d. Tim Perkembangan Politik Daerah
10. Program Pembaruan Kebangsaan
- Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Kab.Tanjung Jabung

Barat

11. Program Ketahanan Ekonomi
- Peningkatan Ketahanan Ekonomi

Tabel berikut ini adalah tabel yang menggambarkan Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Tahun Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun rencana 2017 sebagaimana tertuang dalam ketentuan Permendagri N0 54 tahun 2010, adapun tabel yang dimaksud adalah sebagai berikut



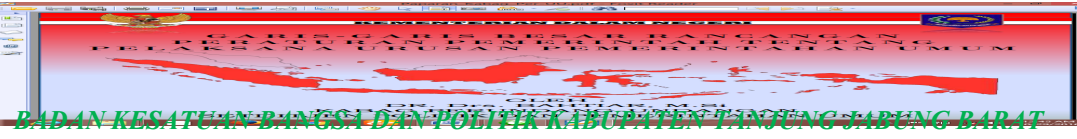
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

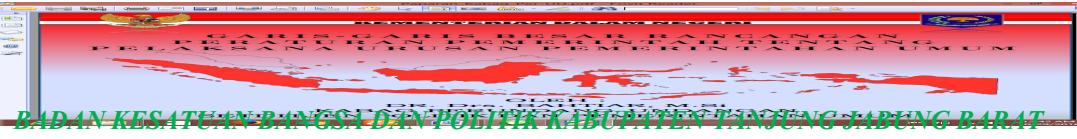
Tabel :T.VI.C.6

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD TAHUN 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN n-3	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 (Tahun Lalu / n-2)			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (Tahun n-1) 2016	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016 (Tahun n-1)				
					TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		Realisasi capaian	Target capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)			
0 1		WAJIB											
0 1	0 1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
0 1	0 1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
0 1	0 1	1 1	0 1	0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan lancar	100%	0%			100%	100	100
0 1	0 1	1 1	0 1	0 1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya Administrasi Surat menyurat	100%	0%			100%	100%	100%
0 1	0 1	1 1	0 1	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	100%	0%			100%	100%	100%



01	01	11	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya Administrasi Keuangan	100%	0%				100%	100%	100%
01	01	11	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya Jasa kebersihan kantor	100%	0%				100%	100%	100%
01	01	11	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor	100%	0%				100%	100%	100%
01	01	11	01	11	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersediannya barang cetakan dan Penggandaan	100%	0%				100%	100%	100%
01	01	11	01	13	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	100%	0%				100%	100%	100%
01	01	11	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Tersediannya Bahan Peraturan Per Undang undangan	100%	0%				100%	100%	100%
01	01	11	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya Makan dan Minuman Kantor	100%	0%				100%	100%	100%
01	01	11	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas untuk Rapat rapat dan koordinasi	100%	0%				100%	100%	100%
01	01	11	01	19	Penyusunan LAKIP Semester dan Tahunan serta penyusunan Renja	Tersediannya Jasa Adm Perkantoran	100%	0%				-	-	
01	01	11	01	20	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersediannya Jasa Adm Perkantoran	100%	0%				-	-	
01	01	11	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor	100%	0%				100%	100%	100%
01	01	11	02	17	Pengadaan Kendaraan Dinas	Peningkatan Prasarana Kantor	100%	0%				-	-	
01	01	11	02	18	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Prasarana Kantor	100%	0%				-	-	
01	01	11	02	19	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Prasarana Kantor	100%	0%				-	-	
01	01	11	02	20	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Peningkatan Prasarana Kantor	100%	0%				100%	100%	100%



01	01	11	02	22	Pemeliharaan Rutin /Berkala kendaraan dinas /Operasional	Peningkatan Prasarana Kantor	100%	0%				100%	100%	100%
01	01	11	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Prasarana Kantor	100%	0%				100%	100%	100%
01	01	11	02	27	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Peningkatan Prasarana Kantor	100%	0%				-	-	0
1	01	11	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	0%				100%	100%	100%
01	01	11	03	02	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Disiplin Pegawai	100%	0%				-	-	0
01	01	11	03	03	Pengadaan Pakaian khusus/ Batik perlengkapannya	Peningkatan Disiplin Pegawai	100%	0%				-	-	0
01	01	11	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan PNS	100%	0%				80%	80%	80%
01	01	11	05	04	Pengembangan SDM	Meningkatnya Keterampilan dalam Kursus dan Bimbingan	100%	0%				100%	100%	100%
01	01	11	06		Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya data dalam bentuk dokumen	100%	0%				80%	80%	80%
01	01	11	06	13	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya kinerja Aparatur	100%	0%				100%	100%	100%
01	01	11	15		Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	0%				86%	86%	86%
01	01	11	15	10	koordinasi kegiatan orang asing, LSM Asing (NGO) dan lembaga Asing di Daerah	Termonitornya keberadaan dan kegiatan orang asing, LSM Asing dan Lembaga Asing	100%	0				100%	100%	100%
01	01	11	15	11	Penilaian dan Pengukuran Indeks Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Mengetahui besaran Indeks keberhasilan dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100%	0						0

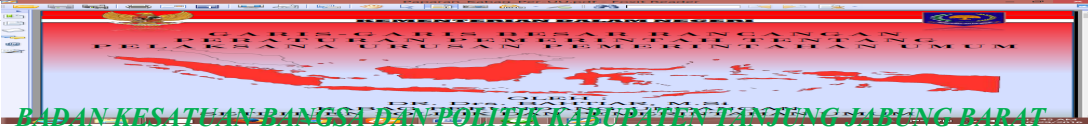


01	01	11	15	15	Penanganan Gangguan Keamanan	Meminimalisir terjadinya Konflik	100%	0			100%	100%	100%
01	01	11	20		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Berkembangnya wawasan kebangsaan	100%	0%			85%	85%	85%
01	01	11	20	06	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama	100%	0			100%	100%	100%
01	01	11	20	07	Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Agama (Pakem)	Terwujudnya aliran kepercayaan dan agama	100%	0			-	-	0
01	01	11	20	08	Sosialisasi Permendagri NO.20 Tahun 2013 Tentang Ketahanan Seni dan Budaya	Peningkatan Seni Dan Budaya	100%	0			-	-	0
01	01	11	20	09	Survey dan Pengukuran Indeks Kerukunan Antar beragama	Mengetahui besaran Indeks keberhasilan dalam Kerukunan Beragama di Tanjung Jabung Barat	100%	0					0
01	01	11	21		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan bangsa	100%	0%			85%	85%	85%
01	01	11	21	06	Forum orientasi pembinaan wawasan kebangsaan	Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan bangsa	100%	0			-	-	0
01	01	11	21	01	Forum Diskusi Penguatan Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	Terciptanya Masyarakat yang ber wawasan kebangsaan	100%	0			100%	100%	100%
01	01	11	17		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Terpeliharanya kemitraan dan Pencegahan tindak kriminal	100%	0%			85%	85%	85%
01	01	11	17	15	Komunitas Inteligen Daerah (KOMINDA)	Terselenggaranya Kegiatan Inteligen Daerah	100%	0			100%	100%	100%
01	01	11	17	03	Foum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terdeteksinya secara dini masalah-masalah yang berkaitan dengan Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah (FKDM)	100%	0			100%	100%	100%



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT

01	01	11	23	03	Bimtek Bela Negara	Tersedianya Kader yang berwawasan Kebangsaan	100%					-	-	0
01	01	11	25		Program Pembauran Kebangsaan	Meningkatnya simulasi pembauran kebangsaan di daerah	100%	0%				90%	90%	90%
01	01	11	25	01	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terwujudnya Pembauran Kemasyarakatan	90%	0				100%	100%	111%
01	01	06	27		Program Ketahanan Eekonomi	Terciptanya Ketahanan Ekonomi di Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat.	100%	0%				96%	96%	0.96
01	01	06	27	01	Peningkatan Ketahanan Eekonomi	Terciptanya ketahanan ekonomi dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100%	0				100%	100%	100%
01	01	06	27	02	Survey Penilaian dan Pengukuran Indeks Ketahanan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Mengetahui besarani Indeks Ketahanan Ekonomi di Tanjung Jabung Barat	100%	0				0	0	0



11.6 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

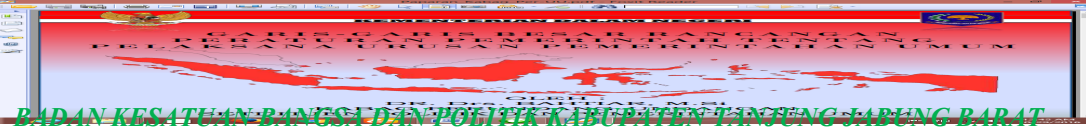
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas – tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing – masing unit kerja (Bidang) yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan struktur organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi masing masing Bidang tersebut dari Sekretaris, BIDANG BINA IDEOLOGI WASBANG, BIDANG BINPOLMAS, BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA.

Adapun rincian tugas dari masing – masing unit kerja (bidang) adalah sebagai berikut:

1) SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok sebahagian tugas Kepala Badan di Bidang Kesekretariatan sebagai berikut :

- a. Membantu memyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja badan.
- b. Menyusun Statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan Tugas.
- c. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan urusan Administrasi Keuangan.
- e. Melaksanakan urusan Rumah Tangga, Administrasi, Tata Usaha dan Kearsipan.
- f. Mengoordinasikan Pelaksanaan dan kegiatan bidang – bidang di lingkup Badan.



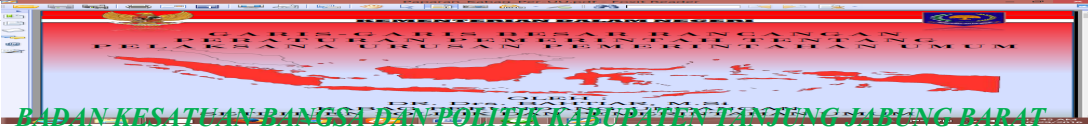
- g. Melaksanakan Tugas Dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

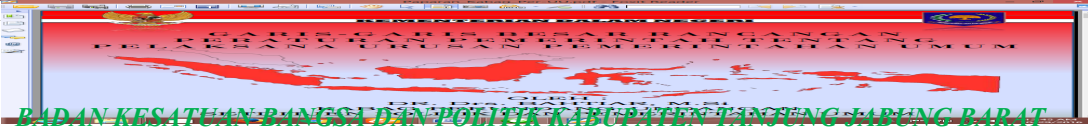
Masing – masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebahagian tugas sekretaris lingkup umum dan kepegawaian sebagai berikut :
 - a. Menyusun bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
 - b. Mengelola admnistrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah badan, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumah tanggaan badan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.
 - c. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
 - d. Melaporkan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian, dan
 - e. Melaksanakan Tugas Dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaannya.



2. Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas sekretaris lingkup keuangan.
 - a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja lingkup keuangan.
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran.
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, pengelolaan pengendalian keuangan, dan menyusun laporan keuangan badan.
 - d. Menyiapkan laporan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, dan
 - e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi dalam pelaksanaannya.

3. Sub bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian sekretaris lingkup perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dari bidang – bidang badan.
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program badan.
 - c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional badan.
 - d. Menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan penilaian pengukuran kinerja Badan.
 - e. Menyiapkan bahan – bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan.



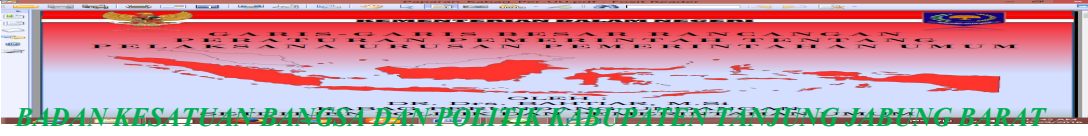
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TINJUNG JABUNG BARAT

- f. Menyiapkan bahan – bahan penyusunan Laporan Pembangunan Daerah (LAPEM) badan.
- g. Menyiapkan bahan untuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) badan, dan
- h. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi dalam pelaksanaannya.

2. KEPALA BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL

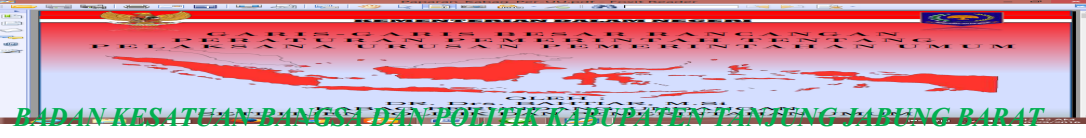
Kepala Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala badan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.

- a. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesabangpol dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga
- b. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesabangpol ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
- c. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umu nasional) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga

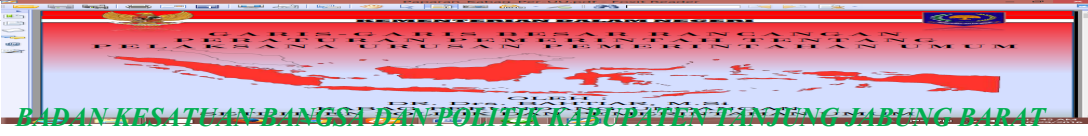


BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LINGSIBANG BARAT

- d. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
- e. Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian pemantauan, pengembangan dan evaluasi) kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga
- f. Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
- g. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga
- h. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
- i. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang kewaspadaan nasional, ideologi dan wawasan kebangsaan;



- j. Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan naskah dinas dibidang tugasnya;
- k. Mengumpulkan dan mengelola data di Bidang kewaspdaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- l. Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas aparatur di Bidang kewaspdaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
- m. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di Bidang kewaspdaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
- n. Melakukan pembinaan Bidang kewaspdaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan



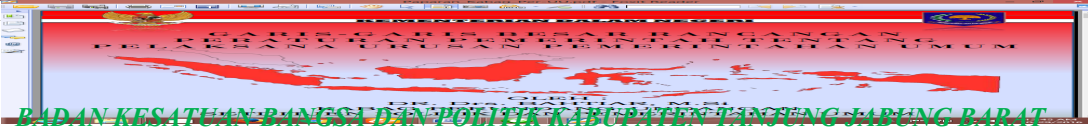
- konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.;
- o. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
 - p. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
 - q. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi dalam pelaksanaannya.

Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional membawahi :

- a. Sub bidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan
- b. Sub bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

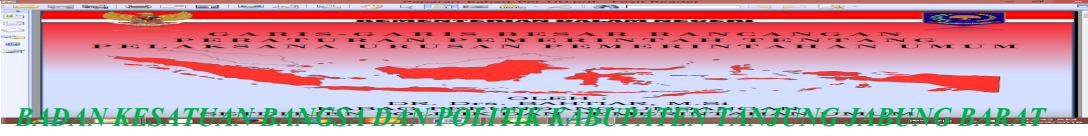
Masing – masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- 1. Sub Bidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian Kepala Bidang lingkup Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan sebagai berikut :



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LINGSIBAR

- a. Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas aparatur di Bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
- b. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
- c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
- e. Menyiapkan dan mengelola data di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
- f. Menyusun rencana kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan evaluasi dalam penyusunan laporan kegiatan Sub bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

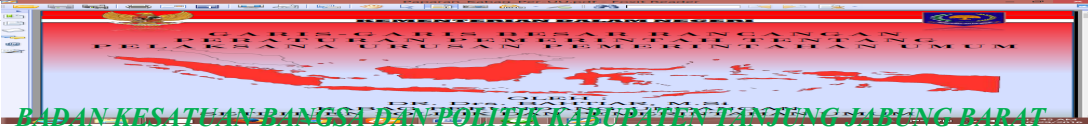


- e. Menyiapkan dan mengelola data kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dalam penyusunan laporan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi dalam pelaksanaannya.

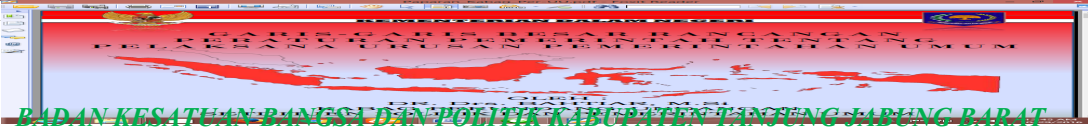
3. KEPALA BIDANG PEMBINAAN POLITIK

Kepala Bidang Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala badan dibidang Pembinaan Politik, pendidikan politik, budaya politik dan Fasilitasi pemilu :

- a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
- b. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada.
- c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi,



- perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang Politik, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;
 - e. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;
 - f. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang pembinaan politik dan kemasyarakatan.
 - g. Melaksanakan kegiatan pembinaan politik dan kemasyarakatan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dibidang pemeliharaan stabilitas politik dan pengembangan demokrasi.
 - h. Melakukan stabilitas hubungan antara lembaga dengan DPRD.
 - i. Mengkoordinasikan pemilihan umum Pilpres dan Pilkada.
 - j. Melakukan pendataan, monitoring, evaluasi dan pembinaan di bidang pemilu serta penyusunan laporan kegiatan di sub bidang pembinaan politik.
 - k. Melakukan koordinasi dan kerja sama antar kepala bidang, dan



1. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

3. KEPALA BIDANG PEMBINAAN POLITIK:

Kepala Bidang Pembinaan Politik membawahi :

a. Sub bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik

b. Sub bidang Kelembagaan dan Fasilitasi Pemilu

Masing – masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Politik.

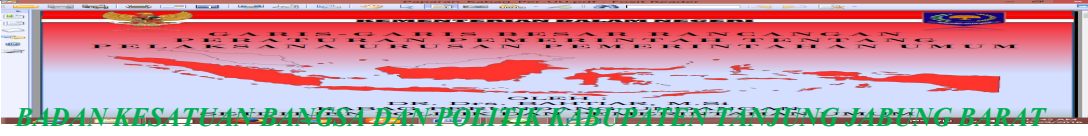
1. Sub implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang Pembinaan Politik sebagai berikut :

a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;

b. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik.

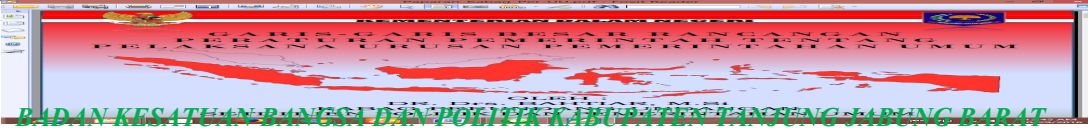
c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;

d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang Politik, sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TINJUNG JABUNG BARAT

- e. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan;
 - f. Menyusun rencana dan program kerja lingkup implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik.
 - g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.
2. Sub Bidang Kelembagaan dan Fasilitasi Pemilu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
 - b. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
 - c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;

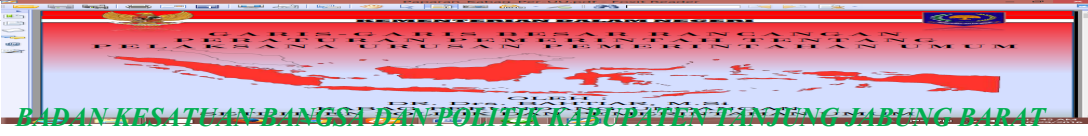


- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
- e. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
- f. Menyusun rencana dan program kerja lingkup subbidang Kelembagaan dan fasilitasi pemilu.
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

4. KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI

Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala badan dibidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi :

- a. Fasilitasi dan ghhhpelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan .
- b. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan,supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan



- evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
- c. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organsiasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan .
 - d. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organsiasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan .
 - e. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
 - f. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebijaksanaan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan ,infestasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi , kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian .
 - g. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian ,pemantauan,pengembangan dan evaluasi) dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya



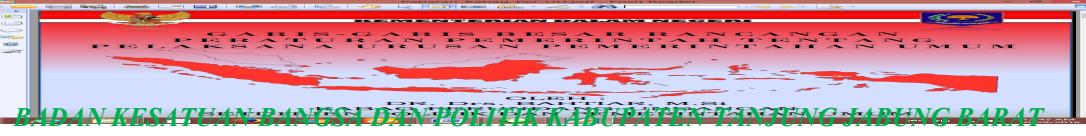
- alam, ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian .
- h. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, Investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian .
 - i. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, perdagangan, lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
 - j. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi membawahi :

- a. Sub bidang Ketahanan Seni dan Budaya
- b. Sub bidang Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi

Masing – masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

- 1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang

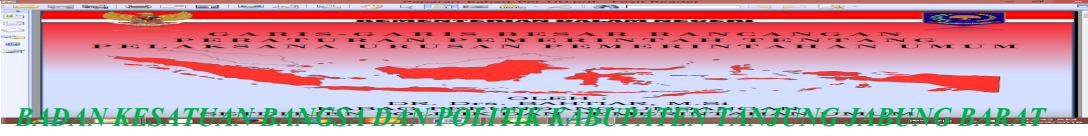


lingkup Ketahanan Seni Budaya Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi :

- a. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya.
- b. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya.
- c. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya.
- d. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya.
- e. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang Ketahanan seni budaya.
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

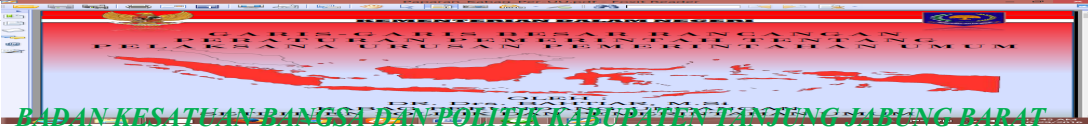
2. Sub Bidang Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi:

- a. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LINGSIBANG BARAT

- b. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
- c. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan .
- d. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan .
- e. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang ketahanan sumber daya alam , ketahanan perdagangan , investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat , kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi , kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
- f. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebijaksanaan dan ketahanan sumber daya alam , ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat , kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian .
- g. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,



pengembangan dan evaluasi) dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam ,ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian .

- h. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, Investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian .
- i. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, perdagangan, lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
- j. penyusunan laporan kegiatan di sub bidang Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan ekonomi.
- k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TINJAU BARAT

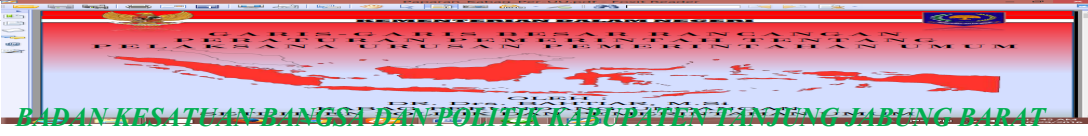


TABEL
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/' 08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun (tahun n-2)	Tahun 2016. (tahun n-1)	Tahun 2017 (tahun n)	Tahun 2018 (tahun n+1)	Tahu..... (tahun n-2)	Tahun2016 (tahun n-1)	Tahun 2017 (tahun n)	Tahun 2018 (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan lancar	Terlaksananya		-	100	100	100	-	100	100	100	
2	pelaksanaan kegiatan kantor	Optimalnya		-	100	100	100	-	100	100	100	
3	disiplin aparatur	Meningkatnya		-	100	100	100	-	100	100	100	
4	wawasan dan pengetahuan PNS	Meningkatnya		-	80	80	80	-	100	100	100	
5	data dalam bentuk dokumen	Tersedianya		-	80	80	80	-	100	100	100	
6	Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya		-	86	86	86	-	100	100	100	
7		Berkembang		-	85	85	85	-	100	100	100	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	ya wawasan kebangsaan											
8	Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan bangsa			-	85	85	85	-	100	100	100	
9	Terpeliharanya kemitraan dan Pencegahan tindak kriminal				85	85	85	-	100	100	100	
10	Terciptanya masyarakat yang berpendidikan politik				86	86	86	-	100	100	100	
11	Tersedianya Kader PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang berwawasan Kebangsaan				90	90	90	-	100	100	100	
12	Meningkatnya simulasi pembauran kebangsaan di daerah			-	90	90	90	-	100	100	100	
13	Terciptanya Ketahanan Ekonomi di Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat.				96	96	96	-	100	100	100	



k.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berkaitan dengan dokumen perencanaan Badan Kesbang Pol Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dokumen perencanaan Badan sebagai berikut :

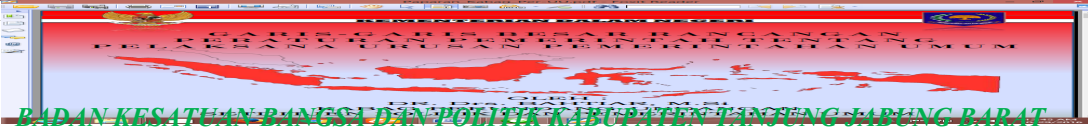
1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun.
2. Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memiliki jangka waktu 1 Tahun sebagai penjabaran dari Renstra SKPD.

Dengan demikian dalam perencanaan harus memuat isu isu tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengemban Tugas, Pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat straregik yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi percepatan tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya pada factor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

Dalam menganalisis dan menyikapi pengaruh lingkungan tersebut dapat analisis SWOT yaitu (strengs, weaknesses, oppurtunities, treaths). Dengan penjelasan bahwa lingkungan internal organisasi terdiri dari dua factor strategis yaitu kekuatan (strengs), dan kelemahan (weaknesses) organisasi, sedangkan lingkungan eksternal organisasi yaitu peluang (oppurtunities) dan acaman/tantangan (treaths). Analisis tersebut



digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengatasi kelemahan dan menanggulangi ancaman serta untuk memperkuat, meningkatkan dan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan identifikasi sebagai berikut :

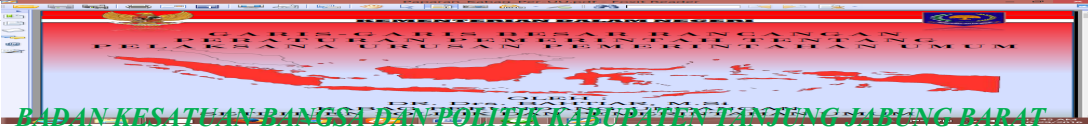
Lingkungan Internal

1. Kekuatan (Strengths)

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- b. Penyediaan anggaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Adanya akses yang baik kepada kepada infra struktur politik dan supra struktur politik.
- d. Adanya koordinasi yang baik di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jambi.
- e. Tersedianya Sumber Daya Manusia.
- f. Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral.

2. Kelemahan (Weaknesses)

- a. Terbatasnya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi.
- b. Terbatasnya anggaran untuk merealisasikan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum optimal.



- d. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
- e. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat kurang dikenal masyarakat.
- f. Job description yang kurang tepat dan kurang jelas disamping terjadi overlapping (tumpang tindih) dengan Badan/ Dinas lain.
- g. Penempatan PNS (mutasi/promosi) yang tidak sesuai dengan kemampuan (skill) dan keahliannya menjada kendala pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- h. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran tugas operasional.

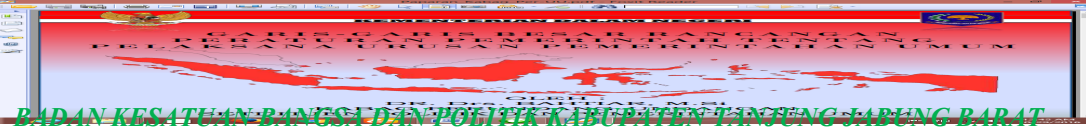
Lingkungan Eksternal

1. Peluang (opportunities)

- a. Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra struktur politik dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi, HAM dan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Partisipasi parpol, ormas/LSM, Perguruan Tinggi, Toga/Tomas dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.

2. Ancaman (treaths)

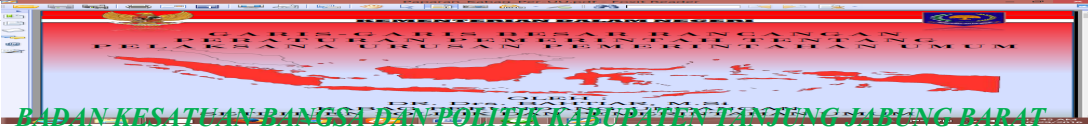
- a. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
- b. Keraguan masyarakat terhadap netralitas seorang PNS
- c. Relatif tingginya potensi konflik dimasyarakat (horizontal, vertical dan SARA)



- d. Kurangnya kesadaran masyarakat, baik secara kelembagaan maupun perorangan dalam memanfaatkan jalur musyawarah atas hukum dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada, sehingga seringkali menempuh melalui media demo/unjuk rasa yang kadangkala berujung pada anarkisme.

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya anggaran untuk merealisasikan program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum optimal.
3. Belum Optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi IT.yang tersedia.
4. Peran Badang Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat kurang dikenal masyarakat.
5. Penempatan PNS (mutasi/promosi) yang tidak sesuai dengan kemampuan (skil) dan keahliannya menjadi kendala pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran tugas operasional.
7. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
8. Potensi terjadinya konflik di masyarakat (horizontal,vertical dan SARA).



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT

9. Kurangnya kesadaran masyarakat, baik secara kelembagaan maupun perorangan dalam memanfaatkan jalur musyawarah atau hukum dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada, sehingga seringkali menempuh melalui media demo/unjuk rasa yang kadangkala berujung pada anarkisme.
10. Adanya koordinasi yang baik di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
11. Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral.
12. Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra struktur politik dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi, HAM dan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
13. Partisipasi Parpol, ormas/LSM, Perguruan Tinggi, Tokoh agama/Tokoh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.

Pada Umumnya kualitas penyelenggaraan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Tanjug Jabung Barat selama lima tahun terakhir terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa Indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya berbagai unsur pendidikan demokrasi melalui kegiatan sosialisasi kunjungan kerja pemantauan pelaksanaan pemilu presiden, legislatif, dan pemilu kada
2. Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan dan memperkuat nilai – nilai luhur
3. Meningkatnya pencegahan tindak kriminal
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pemantauan ekstensi kominda
5. Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat



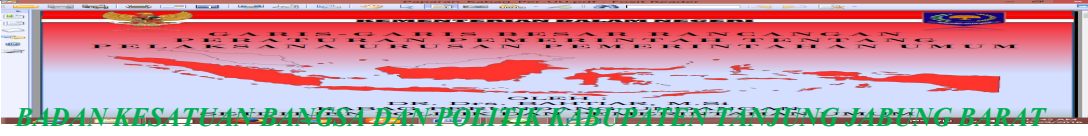
6. Meminimalisasi konflik pemeritahan dan konflik sosial antar warga masyarakat di daerah.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

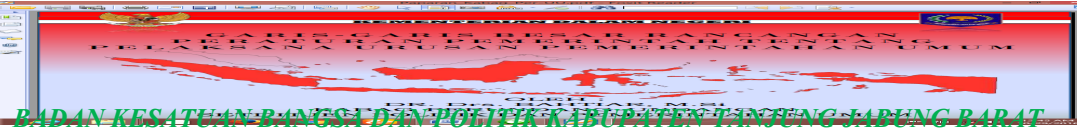
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan diklat fungsional
2. Terselenggaranya forum dialog generasi muda tentang sejarah rasa solidaritas kesatuan bangsa
3. Terlaksananya kerja sama pengembangan kemampuan organisasi politik kemasyarakatan dan lembaga keagamaan dengan pemerintah
4. Terselenggaranya pembinaan dan pemantauan orang asing LSM asing (NGO) dan lembaga asing serta pembinaan kerukunan umat beragama
5. Terselenggaranya pembinaan ketentraman penyakit masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6. Tersusunya dokumen informasi konflik pemerintah dan konflik sosial antar warga masyarakat di daerah perbatasan

k.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan Tahunan. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana



capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat disamping itu dokumen rencana kerja memuat informasi tentang program kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Tabel.T-VI.C.1

Review terhadap Rancangan Awal RESTRA 2016-2021
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Nama SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lembar.....dari...

Rancangan Awal Renstra						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Pe
No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	KESBAN GPOL	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan lancar	100 %	3,565,665,013	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan lancar	100 %	3,565,665,013	
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat		Terlaksananya Administrasi Surat menyurat	100 %	16,999,000	Penyediaan Jasa Surat menyurat		Terlaksananya Administrasi Surat menyurat	100 %	16,999,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	100 %	366,800,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	100 %	366,800,000	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Terwujudnya Administrasi Keuangan	100 %	792,200,000	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Terwujudnya Administrasi Keuangan	100 %	792,200,000	



4	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Terciptanya Jasa kebersihan kantor	100 %	47,719,520	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Terciptanya Jasa kebersihan kantor	100 %	47,719,520	
5	Penyediaan alat tulis kantor		Tersediannya Alat Tulis Kanto	100 %	435,776,700	Penyediaan alat tulis kantor		Tersediannya Alat Tulis Kanto	100 %	435,776,700	
6	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan		Tersediannya barang cetakan dan Penggandaan	100 %	108,872,000	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan		Tersediannya barang cetakan dan Penggandaan	100 %	108,872,000	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Tersediannya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	100 %	26,358,015	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	26,358,015	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan		Tersediannya Bahan Peraturan Per Undang undangan	100 %	34,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	100 %	34,000,000	
9	Penyediaan makanan dan minuman		Tersediannya Makan dan Minuman Kantor	100 %	27,000,000	Penyediaan makanan dan minuman		Penyediaan makanan dan minuman	100 %	27,000,000	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersediannya Biaya Perjalanan Dinas untuk Rapat rapat dan koordinasi	100 %	1,070,939,778	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 %	1,070,939,778	
11	Penyusunan LAKIP Semester dan Tahunan serta penyusunan Renja		Tersediannya Dokumen Perencanaan	100 %	45,000,000	Penyusunan LAKIP Semester dan Tahunan serta penyusunan Renja		Penyusunan LAKIP Semester dan Tahunan serta penyusunan Renja	100 %	45,000,000	
12	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran		Tersediannya Jasa Adm Perkantoran	100 %	594,000,000	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran		Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran	100 %	594,000,000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor	100		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor	100 %	1,465,560,000	



					1,377,560,000					
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Peningkatan Prasarana Kantor	100%	298,460,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Peningkatan Prasarana Kantor	100%	298,460,000
2						Pengadaan Kendaraan Dinas		Peningkatan Prasarana Kantor	4Unit/100	88,000,000
3	Pengadaan peralatan gedung kantor		Peningkatan Prasarana Kantor	100%	250,000,000	Pengadaan peralatan gedung kantor		Peningkatan Prasarana Kantor	100 %	250,000,000
4	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		Peningkatan Prasarana Kantor	100%	260,000,000	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		Peningkatan Prasarana Kantor	100 %	260,000,000
5	Pemeliharaan Rutin /Berkala kendaraan dinas/Operasional		Peningkatan Prasarana Kantor	100%	317,800,000	Pemeliharaan Rutin /Berkala kendaraan dinas/Operasional		Peningkatan Prasarana Kantor	2Un.Rd .4 13Un.Rd2 (100 %)	317,800,000
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung Kantor		Peningkatan Prasarana Kantor	100%	51,300,000	Pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantor		Peningkatan Prasarana Kantor	100%	51,300,000
7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Peningkatan Prasarana Kantor	100%	200,000,000	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Peningkatan Prasarana Kantor	100%	200,000,000
8	-	-	-	-	-					
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya disiplin aparatur	100	170.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya disiplin aparatur	100%	170.000.000
1	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya		Peningkatan Disiplin Pegawai	220 Stel	85.000.000	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya		Ketertiban dan Disiplin Aparatur	220 Stel (100 %)	85.000.000
2	Pengadaan Pakaian khusus/ Batik perlengkapannya		Peningkatan Disiplin Pegawai	220 Stel	85.000.000	Pengadaan Pakaian khusus/ Batik perlengkapannya		Ketertiban dan Disiplin Aparatur	220 Stel (100 %)	85.000.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya wawasan danpengetahuan PNS	80%	150.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya wawasan danpengetahuan PNS	80% PNS	320.000.000
1	Pengembangan SDM		Meningkatnya Keterampilan dalam Kursus dan Bimbingan	80 Peserta	150.000.000	Meningkatnya Keterampilan dalam Kursus dan Bimbingan		Meningkatnya Keterampilan dalam Kursus dan Bimbingan	80Orang (100 %)	320.000.000
5	Program Peningkatan		Tersedianya data	80%		Program Peningkatan		Tersedianya data dalam	80%	340,225,000



	Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan		dalam bentuk dokumen		340,225,000	Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan		bentuk dokumen			
1	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan		Meningkatnya kinerja Aparatur	100 %	340,225,000	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan		Meningkatnya kinerja Aparatur	100%	340,225,000	
6	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan	86%	4,579,745,000	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan	86%	4,629,745,000	
1	koordinasi kegiatan orang asing, LSM Asing (NGO) dan lembaga Asing di Daerah		Termonitornya keberadaan dan kegiatan orang asing, LSM Asing dan Lembaga Asing	80%	561,480,000	Koordinasi kegiatan orang asing, LSM Asing (NGO) dan lembaga Asing di Daerah		Termonitornya keberadaan dan kegiatan orang asing, LSM Asing dan Lembaga Asing	100%	561,480,000	
2	Penilaian dan Pengukuran Indeks Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		Mengetahui besaran Indeks keberhasilan dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100 %	300.000.000	Penilaian dan Pengukuran Indeks Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		Mengetahui besaran Indeks keberhasilan dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100%	350.000.000	Awal dan A
3	Penanganan Gangguan Keamanan		Meminimalisir terjadinya Konflik	80%	3,718,265,000	Penanganan Konflik Sosial		Meminimalisir terjadinya Konflik	100%	3,718,265,000	
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Berkembangnya wawasan kebangsaan	85 %	3,413,533,700	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Berkembangnya wawasan kebangsaan	85	3,413,533,700	
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama		Terwujudnya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama	90%	2,098,880,200	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama		Terwujudnya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama	100%	2,098,880,200	
2	Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Agama (Pakem)		Terwujudnya aliran kepercayaan dan agama	78%	593,653,500	Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Agama (Pakem)		Terwujudnya aliran kepercayaan dan agama	100%	593,653,500	



3	Sosialisasi Permendagri N0.20 Tahun 2013 Tentang Ketahanan Seni dan Budaya		Peningkatan Seni Dan Budaya	86%	371,000,000	Sosialisasi Permendagri N0.20 Tahun 2013 Tentang Ketahanan Seni dan Budaya		Peningkatan Seni Dan Budaya	100%	371,000,000
4	Survey dan Pengukuran Indeks Kerukunan Antar beragama		Mengetahui besaran Indeks keberhasilan dalam	0	350,000,000	Survey dan Pengukuran Indeks Kerukunan Antar beragama		Mengetahui besaran Indeks keberhasilan dalam Kerukunan Beragama di Tanjung Jabung Barat	100%	350,000,000
8	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan bangsa	85 %	883,473,500	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan bangsa	85%	883,473,500
1	Forum orientasi pembinaan wawasan kebangsaan		Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan bangsa	85%	274,183,500	Forum orientasi pembinaan wawasan kebangsaan		Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan bangsa	100%	274,183,500
2	Forum Diskusi Penguatan Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan		Terciptanya Masyarakat yang ber wawasan kebangsaan	85%	609,290,000	Forum Diskusi Penguatan Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan		Terciptanya Masyarakat yang ber wawasan kebangsaan	100%	609,290,000
9	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		Terpeliharanya kemitraan dan Pencegahan tindak kriminal	85 %	4,637,602,000	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		Terpeliharanya kemitraan dan Pencegahan tindak kriminal	100%	4,637,602,000
1	Komunitas Inteligen Daerah (KOMINDA)		Terselenggaranya Kegiatan Inteligen Daerah	87%	3,334,972,000	Komunitas Inteligen Daerah (KOMINDA)		Terselenggaranya Kegiatan Inteligen Daerah	100 %	3,334,972,000
2	Foum Kewaspadaan Dini Masyarakat		Terdetiksinya secara dini masalah-masalah yang berkaitan Masyarakat di Daerah (FKDM) dengan Kewaspadaan dini	80 %	932,630,000	Foum Kewaspadaan Dini Masyarakat		Terdetiksinya secara dini masalah-masalah yang berkaitan dengan Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah (FKDM)	100%	932,630,000



3	Sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalah Gunaan Narkoba		Meningkatnya Kesadaran Tentang Bahaya Narkotika dan Obat Berbahaya (NARKOBA)	0	120.000.000	Sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalah Gunaan Narkoba		Meningkatnya Kesadaran Tentang Bahaya Narkotika dan Obat Berbahaya (NARKOBA)	100%	120.000.000	
4	Bintek Kominda		Twersedianya Kader Komida yang mampu mendeteksi Gangguan dan Kenyamanan Daerah	0	250.000.000	Bintek Kominda		Twersedianya Kader Komida yang mampu mendeteksi Gangguan dan Kenyamanan Daerah	100%	250.000.000	
10	Program Pendidikan Politik Masyarakat		Terciptanya masyarakat yang berpendidikan Politik	86%	5,149,343,500	Program Pendidikan Politik Masyarakat		Terciptanya masyarakat yang berpendidikan politik	86%	5,149,343,500	
1	Tim Penelitian dan Pemeriksaan Administrasi Keuangan Parpol		Terlaksananya Penyaluran dana bantuan Parpol	90%	440,190,000	Tim Penelitian dan Pemeriksaan Administrasi Keuangan Parpol		Terlaksananya Penyaluran dana bantuan Parpol	100%	440,190,000	
2	Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat		Serap Aspirasi Forum LSM	87%	1,947,458,200	Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat		Serap Aspirasi Forum LSM	100%	1,947,458,200	
3	Pembinaan pendidikan Politik Masyarakat		Meningkatnya Pemahaman dan partisipasi masyarakat di bidang Politik	80%	418,592,000	Pembinaan pendidikan Politik Masyarakat		Meningkatnya Pemahaman dan partisipasi masyarakat di bidang Politik	100%	418,592,000	
4	Tim Perkembangan Politik Daerah		Meningkatnya pelaksanaan koordinasi Tim Perkembangan politik daerah dalam rangka pemantauan dan pelaporan	89%	1,993,103,300	Tim Perkembangan Politik Daerah		Meningkatnya pelaksanaan koordinasi Tim Perkembangan politik daerah dalam rangka pemantauan dan pelaporan	100%	1,993,103,300	
5	Survey Penilaian dan Pengukuran Indeks Demokrasi		Mengetahui besaran Indeks kebebasan berdemokrasi	0	350,000,000	Survey Penilaian dan Pengukuran Indeks Demokrasi		Mengetahui besaran Indeks kebebasan berdemokrasi	100%	350,000,000	
11	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Memasyarakatkan dan Menyebarluaskan Bela Negara		Tersedianya Kader PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang berwawasan Kebangsaan	90%	497,000,000	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Memasyarakatkan dan Menyebarluaskan Bela Negara		Tersedianya Kader PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang berwawasan Kebangsaan	90%	497,000,000	



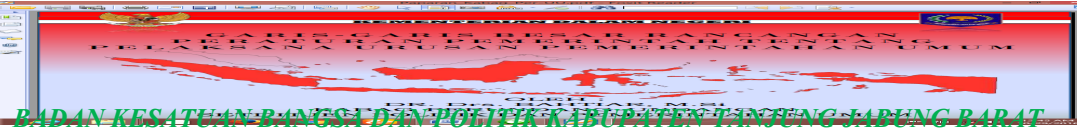
1	Bimtek Bela Negara		Tersedianya Kader yang berwawasan Kebangsaan	90 %	497,000,000	Bimtek Bela Negara		Tersedianya Kader yang berwawasan Kebangsaan	100%	497,000,000	
12	Program Pembauran Kebangsaan		Meningkatnya simulasi pembauran kebangsaan di daerah	90 %	1,435,893,700	Program Pembauran Kebangsaan		Meningkatnya simulasi pembauran kebangsaan di daerah	90%	1,435,893,700	
1	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		Terwujudnya Pembauran Kemasyarakatan	90%	1,435,893,700	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		Terwujudnya Pembauran Kemasyarakatan	100%	1,435,893,700	
13	Program Ketahanan Eekonomi		Terciptanya Ketahanan Ekonomi di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	96%	983,402,000	Program Ketahanan Eekonomi		Terciptanya Ketahanan Ekonomi di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	96%	983,000 402,	
1	Peningkatan Ketahanan Eekonomi		Terciptanya ketahanan ekonomi dalam wilayah Tanjung Jabung Barat	96 %	633,402,000	Program Ketahanan Eekonomi		Terciptanya Ketahanan Ekonomi di Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat.	100%	633,402,000	
2	Survey Penilaian dan Pengukuran Indeks Ketahanan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Baat		Mengetahui besarani Indeks Ketahanan Ekonomi di Tanjung Jabung Barat	96%	350,000,000	Survey Penilaian dan Pengukuran Indeks Ketahanan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Baat		Mengetahui besarani Indeks Ketahanan Ekonomi di Tanjung Jabung Barat	100%	350,000,000	



Tabel.T-VI.C.1.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan yang dibagi dalam lima tahapan yaitu tahun pertama, kedua, ketiga sampai tahun kelima resntra 201- 6 2021 dan pada saat ini dapat kami sampaikan tabel T-VI.C8 tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2017 yang merupakan review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017

Adapun rencana program dimaksud yang sudah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021. Adalah sebagai berikut dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel.T-VI.C.8

RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Lembar.....dari.....

No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	SUMBER DANA	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantor dengan lancar	100 %	3,565,665,013		
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat		Terlaksananya Administrasi Surat menyurat	100 %	16,999,000	APBD	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	100 %	366,800,000	APBD	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Terwujudnya Administrasi Keuangan	100 %	792,200,000	APBD	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Terciptanya Jasa kebersihan kantor	100 %	47,719,520	APBD	
5	Penyediaan alat tulis kantor		Tersediannya Alat Tulis Kanto	100 %	435,776,700	APBD	
6	Penyediaan barang cetakan dan		Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	100 %	108,872,000	APBD	



	Penggandaan						
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	26,358,015	APBD	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	100 %	34,000,000	APBD	
9	Penyediaan makanan dan minuman		Penyediaan makanan dan minuman	100 %	27,000,000	APBD	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 %	1,070,939,778	APBD	
11	Penyusunan LAKIP Semester dan Tahunan serta penyusunan Renja		Penyusunan LAKIP Semester dan Tahunan serta penyusunan Renja	100 %	45,000,000	APBD	
12	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran		Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran	100 %	594,000,000	APBD	
						APBD	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor	100 %	1,465,560,000	APBD	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Peningkatan Prasarana Kantor	100%	298,460,000	APBD	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas		Peningkatan Prasarana Kantor	4Unit/100	88,000,000	APBD	
3	Pengadaan peralatan gedung kantor		Peningkatan Prasarana Kantor	100 %	250,000,000	APBD	
4	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		Peningkatan Prasarana Kantor	100 %	260,000,000	APBD	
5	Pemeliharaan Rutin /Berkala kendaraan dinas/Operasional		Peningkatan Prasarana Kantor	2Un.Rd.4 13Un.Rd2 (100 %)	317,800,000	APBD	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Peningkatan Prasarana Kantor	100%	51,300,000	APBD	



7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Peningkatan Prasarana Kantor	100%	200,000,000	APBD	
8						APBD	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya disiplin aparatur	100%	170.000.000	APBD	
1	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya		Ketertiban dan Disiplin Aparatur	220 Stel (100 %)	85.000.000	APBD	
2	Pengadaan Pakaian khusus/ Batik perlengkapannya		Ketertiban dan Disiplin Aparatur	220 Stel (100 %)	85.000.000	APBD	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya wawasan dan pengetahuan PNS	80% PNS	320.000.000	APBD	
1	Meningkatnya Keterampilan dalam Kursus dan Bimbingan		Meningkatnya Keterampilan dalam Kursus dan Bimbingan	80Orang (100 %)	320.000.000	APBD	
5	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya data dalam bentuk dokumen	80%	340,225,000	APBD	
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Meningkatnya kinerja Aparatur	100%	340,225,000	APBD	
6	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan	86%	4,629,745,000	APBD	
1	Koordinasi kegiatan orang asing, LSM Asing (NGO) dan lembaga Asing di Daerah		Termonitornya keberadaan dan kegiatan orang asing, LSM Asing dan Lembaga Asing	100%	561,480,000	APBD	
2	Penilaian dan Pengukuran Indeks Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		Mengetahui besaran Indeks keberhasilan dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100%	350.000.000	APBD	Awal dan Akhir
3	Penanganan Konflik Sosial		Meminimalisir terjadinya Konflik	100%	3,718,265,000	APBD	
4						APBD	



5						APBD	
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Berkembangnya wawasan kebangsaan	85	3,413,533,700	APBD	
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama		Terwujudnya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama	100%	2,098,880,200	APBD	
2	Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Agama (Pakem)		Terwujudnya aliran kepercayaan dan agama	100%	593,653,500	APBD	
3	Sosialisasi Permendagri N0.20 Tahun 2013 Tentang Ketahanan Seni dan Budaya		Peningkatan Seni Dan Budaya	100%	371,000,000	APBD	
4	Survey dan Pengukuran Indeks Kerukunan Antar beragama		Mengetahui besaran Indeks keberhasilan dalam Kerukunan Beragama di Tanjung Jabung Barat	100%	350,000,000	APBD	
5						APBD	
8	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan bangsa	85%	883,473,500	APBD	
1	Forum orientasi pembinaan wawasan kebangsaan		Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan bangsa	100%	274,183,500	APBD	
2	Forum Diskusi Penguatan Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan		Terciptanya Masyarakat yang ber wawasan kebangsaan	100%	609,290,000	APBD	
9	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		Terpeliharanya kemitraan dan Pencegahan tindak kriminal	100%	4,637,602,000	APBD	
1	Komunitas Inteligen Daerah (KOMINDA)		Terselenggaranya Kegiatan Inteligen Daerah	100 %	3,334,972,000	APBD	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT

2	Fom Kewaspadaan Dini Masyarakat		Terdeteksinya secara dini masalah-masalah yang berkaitan dengan Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah (FKDM)	100%	932,630,000	APBD	
3	Sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalah Gunaan Narkoba		Meningkatnya Kesadaran Tentang Bahaya Narkotika dan Obat Berbahaya (NARKOBA)	100%	120.000.000	APBD	
4	Bintek Kominda		Twersedianya Kader Komida yang mampu mendeteksi Gangguan dan Kenyamanan Daerah	100%	250.000.000	APBD	
10	Program Pendidikan Politik Masyarakat		Terciptanya masyarakat yang berpendidikan politik	86%	5,149,343,500	APBD	
1	Tim Penelitian dan Pemeriksaan Administrasi Keuangan Parpol		Terlaksananya Penyaluran dana bantuan Parpol	100%	440,190,000	APBD	
2	Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat		Serap Aspirasi Forum LSM	100%	1,947,458,200	APBD	
3	Pembinaan pendidikan Politik Masyarakat		Meningkatnya Pemahaman dan partisipasi masyarakat di bidang Politik	100%	418,592,000	APBD	
4	Tim Perkembangan Politik Daerah		Meningkatnya pelaksanaan koordinasi Tim Perkembangan politik daerah dalam rangka pemantauan dan pelaporan	100%	1,993,103,300	APBD	
5	Survey Penilaian dan Pengukuran Indeks Demokrasi		Mengetahui besaran Indeks kebebasan berdemokrasi	100%	350,000,000	APBD	
11	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Memasyarakatkan dan Menyebarkan Bela Negara		Tersedianya Kader PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang berwawasan Kebangsaan	90%	497,000,000	APBD	
1	Bimtek Bela Negara		Tersedianya Kader yang berwawasan Kebangsaan	100%	497,000,000	APBD	
12	Program Pembauran Kebangsaan		Meningkatnya simulasi pembauran kebangsaan di daerah	90%	1,435,893,700	APBD	

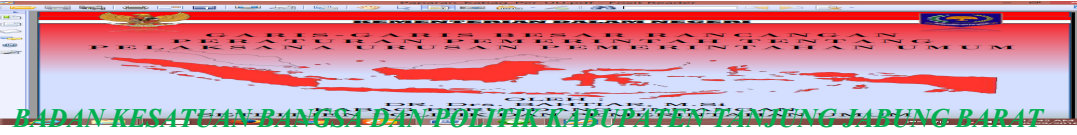


1	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		Terwujudnya Pembauran Kemasyarakatan	100%	1,435,893,700	APBD	
13	Program Ketahanan Eekonomi		Terciptanya Ketahanan Ekonomi di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	96%	983, 000 402,	APBD	
1	Program Ketahanan Eekonomi		Terciptanya Ketahanan Ekonomi di Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat.	100%	633,402,000	APBD	
2	Survey Penilaian dan Pengukuran Indeks Ketahanan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Baat		Mengetahui besarani Indeks Ketahanan Ekonomi di Tanjung Jabung Barat	100%	350,000,000	APBD	



Tabel T-VI.C.13
Usulan Program dan Kegiatan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017
Propinsi Jambi

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Pagu
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		236,546,913
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya Administrasi Surat menyurat	12 bulan / 222 lbr	999,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Tersedianya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	12 bulan	28,200,000
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Terwujudnya Administrasi Keuangan	12 bulan	58,850,000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Terciptanya Jasa kebersihan kantor	12 bulan	9,436,655
5	Penyediaan alat tulis kantor	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Tersediannya Alat Tulis Kantor	12 bulan	22,221,450
6	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	12 bulan	5,422,000



7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	12 bulan	2,634,115
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Tersediannya Bahan Peraturan Per Undang-undangan	12 bulan	4,200,000
9	Penyediaan makanan dan minuman	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Tersediannya Makan dan Minuman Kantor	12 bulan	4,200,000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Tersediannya Biaya Perjalanan Dinas untuk Rapat rapat dan koordinasi	12 bulan	100,383,693
11	Penyusunan LAKIP Semester dan Tahunan serta penyusunan Renja	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Tersediannya Dokumen Lakip, Renstra, dan Renja	-	-
12	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Tersediannya Jasa Adm Perkantoran	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor		120,580,000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Peningkatan Prasarana Kantor	-	-
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Peningkatan Prasarana Kantor	-	-
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Peningkatan Prasarana Kantor	-	-
4	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Peningkatan Prasarana Kantor	12 bulan	22,000,000
5	Pemeliharaan Rutin /Berkala kendaraan dinas/Operasional	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Peningkatan Prasarana Kantor	2 unit R4, 13 Unit R2, 1 unit mesin genset	92,280,000
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Peningkatan Prasarana Kantor	7 unit komputer, 6 unit AC	6,300,000
7	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Peningkatan Prasarana Kantor	-	-



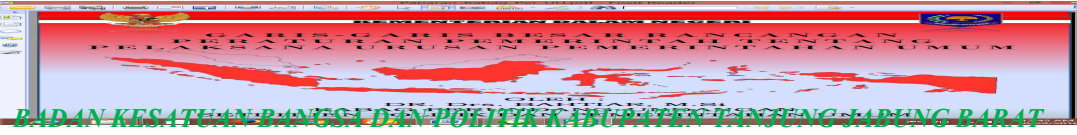
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya disiplin aparatur		16,875,000
1	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Peningkatan Disiplin Pegawai	32 Stel PNS, 13 Stel Non PNS	16,875,000
2	Pengadaan Pakaian khusus/ Batik perlengkapannya	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Peningkatan Disiplin Pegawai	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya wawasan dan pengetahuan PNS		10,000,000
1	Pengembangan SDM	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya Keterampilan dalam Kursus dan Bimbingan	2 Orang	10,000,000
5	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tersedianya data dalam bentuk dokumen		18,325,000
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya kinerja Aparatur	12 bulan / 3 dokumen	18,325,000
6	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan		Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan		114,370,000
1	Koordinasi kegiatan orang asing, LSM Asing (NGO) dan lembaga Asing di Daerah	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Termonitornya keberadaan dan kegiatan orang asing, LSM Asing dan Lembaga Asing	12 bulan	59,950,000
2	Penilaian dan Pengukuran Indeks Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Mengetahui besaran Indeks keberhasilan dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	-
3	Penanganan Gangguan Keamanan/Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Meminimalisir terjadinya Konflik	13 Kecamatan	54,420,000



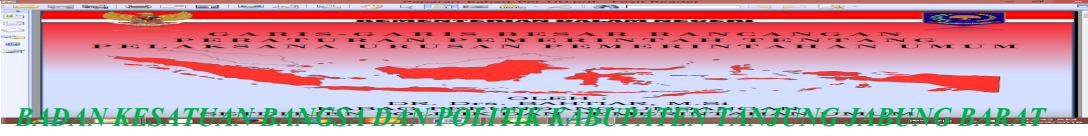
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Berkembangnya wawasan kebangsaan		118,000,000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Terwujudnya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama	3 Kecamatan	118,000,000
2	Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Agama (Pakem)	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Terwujudnya aliran kepercayaan dan agama	-	-
3	Sosialisasi Permendagri N0.20 Tahun 2013 Tentang Ketahanan Seni dan Budaya	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Peningkatan Seni Dan Budaya	-	-
4	Survey dan Pengukuran Indeks Kerukunan Antar beragama	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Mengetahui besaran Indeks keberhasilan dalam Kerukunan Beragama di Tanjung Jabung Barat	-	-
8	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan bangsa		50,220,000
1	Forum orientasi pembinaan wawasan kebangsaan	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan bangsa	40 Orang peserta	14,625,000
2	Forum Diskusi Penguatan Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Terciptanya Masyarakat yang berwawasan kebangsaan	30 orang peserta	35,595,000
9	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		Terpeliharanya kemitraan dan Pencegahan tindak kriminal		205,550,000
1	Foum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Terdeteksinya secara dini masalah-masalah yang berkaitan dengan Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah (FKDM)	3 Kecamatan	85,510,000
2	Komunitas Inteligen Daerah (KOMINDA)	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Terselenggaranya Kegiatan Inteligen Daerah	13 Kecamatan	120,040,000



3	Sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalah Gunaan Narkoba	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya Kesadaran Tentang Bahaya Narkotika dan Obat Berbahaya (NARKOBA)	-	-
4	Bintek Kominda	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Twersedianya Kader Komida yang mampumendeteksi Gangguan dan Kenyamanan Daerah	-	-
10	Program Pendidikan Politik Masyarakat		Terciptanya masyarakat yang berpendidikan politik		348,026,850
1	Tim Penelitian dan Pemeriksaan Administrasi Keuangan Parpol	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Terlaksananya Penyaluran dana bantuan Parpol	7 Orang verifikator / 11 partai	65,181,550
2	Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Serap Aspirasi Forum LSM	54 ormas	48,600,000
3	Pembinaan pendidikan Politik Masyarakat	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya Pemahaman dan partisipasi masyarakat di bidang Politik	60 orang peserta	68,642,000
4	Tim Perkembangan Politik Daerah	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya pelaksanaan koordinasi Tim Perkembangan politik daerah dalam rangka pemantauan dan pelaporan	13 Kecamatan	165,603,300
5	Survey Penilaian dan Pengukuran Indeks Demokrasi	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Mengetahui besaran Indeks kebebasan berdemokrasi	-	-
11	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Memasyarakatkan dan Menyebarkan Bela Negara		Tersedianya Kader PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang berwawasan Kebangsaan		-
1	Bimtek Bela Negara	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Tersedianya Kader yang berwawasan Kebangsaan	-	-



1 2	Program Pembauran Kebangsaan		Meningkatnya simulasi pembauran kebangsaan di daerah		81,630,000
1	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Terwujudnya Pembauran Kemasyarakatan	13 Kecamatan	81,630,000
1 3	Program Ketahanan Eekonomi		Terciptanya Ketahanan Ekonomi di Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat.		-
1	Peningkatan Ketahanan Eekonomi	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Terciptanya ketahanan ekonomi dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	-
2	Survey Penilaian dan Pengukuran Indeks Ketahanan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Baat	Badan Kesbang Pol Kab. Tanjab Barat	Mengetahui besarani Indeks Ketahanan Ekonomi di Tanjung Jabung Barat	-	-



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel.T-VI.C.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tabel.T-VI.C.1.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

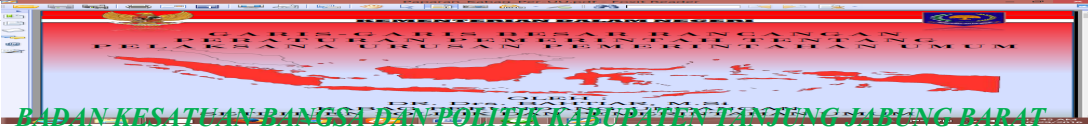
Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusunnya Visi dan Misi tersebut adalah guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing – masing misi.

Dalam upaya menunjukkan visi kepada Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 yaitu "TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS".

Penjabaran dari Misi Kepala Daerah terpilih pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 adalah sebagai berikut:

MAJU berarti daerah yang memiliki standar hidup relatif tinggi serta ekonomi merata. Pendapatan masyarakat meningkat melalui pengembangan industri dan ekonomi kerakyatan.

ADIL berarti kondisi yang ideal secara moral dan material. Anggaran daerah yang pro rakyat meningkat. Terwujudnya pemerataan



pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.

MAKMUR berarti kehidupan masyarakat sejahtera yang terlihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

BERMARTABAT berarti suatu kondisi manusia ideal dimana terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karyanya yang nyata.

BERKUALITAS berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkungan hidup.

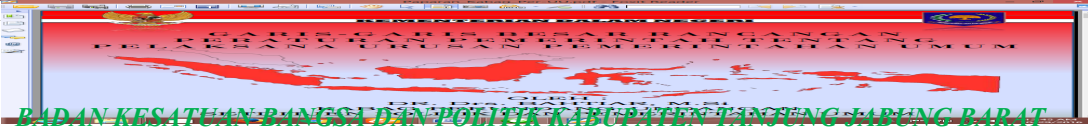
Untuk mencapai Visi yang dimaksud di atas maka harus di jalankan beberapa Misi, adapun Misi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

MISI KEPALA DAERAH

Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai Visi Daerah adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung rencana kerja Pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2016-2021 sebagaimana tersirat dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka

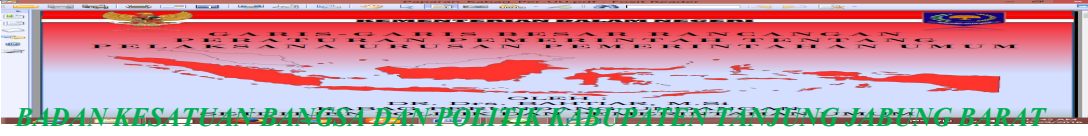


Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai SKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menetapkan Visi Misi nya sesuai dengan maksud dan tujuan Visi Misi Kepala Daerah terpilih . Adapun Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN MENUJU MASYARAKAT MADANI”

Untuk mewujudkan Visi Badan Kesatuan Bangsa,dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka ditetapkanlah Misi. Dimana Misi tersebut merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada dan apa yang dilakukannya serta bagaimana melakukannya. Adapun Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem kerja yang profesional yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas;
2. Mewujudkan iklim kehidupan diwilayah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang demokratis, dinamis, tentram dan damai yang ditopang oleh mantapnya wawasan kebangsaan, integritas dan ketahanan bangsa di daerah;
3. Meningkatnya pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat guna mengembangkan budaya politik yang demokratis melalui pemberdayaan lembaga infrastruktur politik;



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT

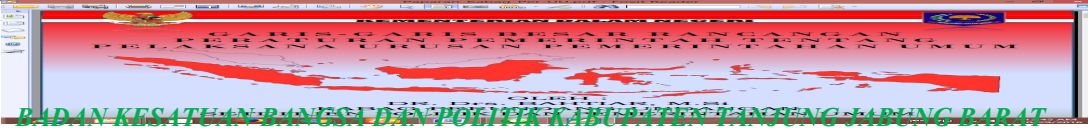
- 4. menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat agar berperan serta dalam mengantisipasi, mencegah, menyelamatkan serta merehabilitasi kerusakan dan kerugian akibat bencana;
- 5. Mewujudkan pelatihan pengendalian dan kenyamanan lingkungan masyarakat.

Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah :

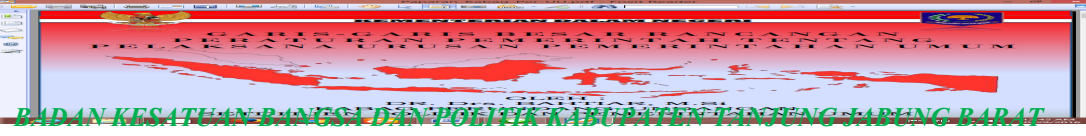
- 1. **Perencanaan pembangunan yang berkualitas**
Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah proses perencanaan yang transparan yaitu proses perencanaan dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan prinsip keadilan dan aspirasi masyarakat konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak yaitu dalam melaksanakan proses dilakukan dengan terukur secara kuantitas atau kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

Adapun misi dan tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

MISI	TUJUAN
Mewujudkan sistem kerja yang profesional yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana untuk menunjang profesionalisme aparatur perencanaan pembangunan
Mewujudkan iklim kehidupan	Mantapnya wawasan kebangsaan



diwilayah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang demokratis, dinamis, tentram dan damai yang ditopang oleh mantapnya wawasan kebangsaan, integritas dan ketahanan bangsa di daerah.	sebagai perekat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Meningkatnya pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat guna mengembangkan budaya politik yang demokratis melalui pemberdayaan lembaga infrastruktur politik.	Terwujudnya stabilitas politik yang dinamis dan kondusif bagi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan
Mewujudkan pelatihan pengendalian dan kenyamanan lingkungan masyarakat	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, damai, tentram dan bersatu

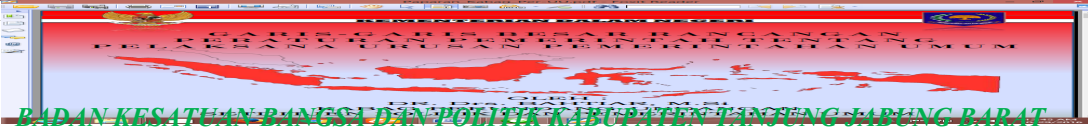


B. SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima tahun dan dilaksanakan secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan sasaran yang ditetapkan harus terukur untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur.

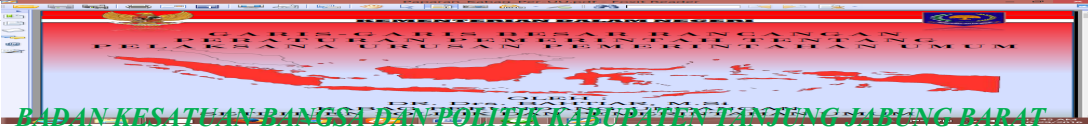
Adapun sasaran-sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi dengan capaian program/kegiatan merupakan tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor, kesejahteraan pegawai
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasana aparatur dengan output kegiatan memenuhi kebutuhan perlengkapan sarana dan prasarana aparatur dalam meningkatkan kinerja pegawai.
3. Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai capaian program/kegiatan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam berpakaian.
4. Terwujudnya sumber daya manusia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat pendidikan dan latihan untuk meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan.
5. Tertatanya sistem Pelaporan dan keuangan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program Kesbang dan Politik. Dengan output pembulatan laporan, prognosis, usulan program, evaluasi kegiatan, perhimpunan peraturan perUndang-undangan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



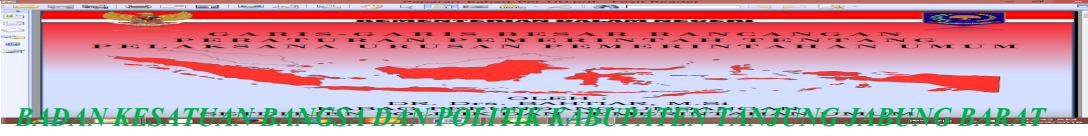
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT

6. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Orang Asing, LSM Asing (NGO) dan lembaga asing. Dengan output rapat koordinasi pembinaan terhadap Lembaga Asing, Orang Asing yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pengusaha Asing, dan Tenaga Kerja Asing.
 - b. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dalam rangka menciptakan keharmonisan antar umat dengan output kegiatan rapat koordinasi forum kerukunan umat beragama yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - c. Pembinaan dan Pemantapan Eksistensi Kominda di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan output Rapat Koordinasi dan deteksi dini tentang Komindadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang melibatkan kalangan Intelijen dan Aparatur Pemerintah.
 - d. Pembinaan dan Pemantauan aparatur Penanganan konflik dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dengan output kegiatan pemantauan dan pembinaan di wilayah ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penanganan konflik yang terjadi di daerah dengan melibatkan aparatur dan masyarakat serta pihak – pihak yang berkepentingan
 - e. Kerjasama pengembangan kemampuan organisasi politik, kemasyarakatan dan lembaga keagamaan dengan Pemerintah. Dengan capaian kegiatan agar terbinanya kerjasama yang baik antara organisasi politik, Ormas Lembaga Keagamaan serta aparatur Pemerintah.

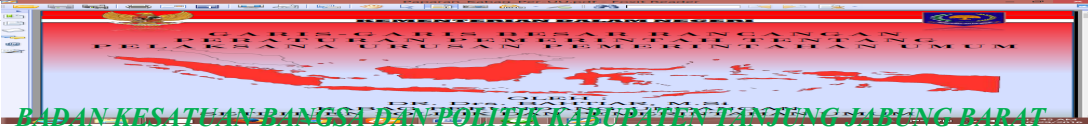


BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT

- f. Peningkatan/pembinaan kapasitas/kualitas organisasi politik dan kemasyarakatan.
 - g. Pembangunan gedung dan Ormas/keagamaan LSM dan OKP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan capaian kegiatan terbentuknya gedung LSM dan perlengkapannya untuk menyatukan dan membina LSM yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - h. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan dengan output kegiatan memantau, evaluasi berbagai Ormas dan LSM yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Terwujudnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat dengan capaian kegiatan terlaksananya rasa solidaritas dan ketahanan berbangsa dan meningkatkan rasa persatuan berbangsa di kalangan masyarakat.
 - b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai – nilai luhur budaya masyarakat dengan indikator kinerja mensosialisasikan rasa cinta tanah air akan budaya dengan melibatkan aparatur dan masyarakat.
 - c. Dialog generasi muda dengan Palaku Sejarah dengan menanamkan jiwa patriotisme di kalangan generasi muda, Pelajar dan Mahasiswa dengan mengenalkan para pelaku sejarah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - d. Penataran Ketahanan Bangsa dengan output kegiatan memberikan penataran ke berbagai kalangan Mahasiswa, Pelajar, Dharma Wanita, aparatur dalam mempertahankan, menjaga keutuhan dan cinta tanah air.



- e. Fasilitasi hubungan antar lembaga keagamaan dan pendidikan dengan Pemerintah dalam perannya sebagai agen perubahan.
 - f. Monitoring dan evaluasi aktivitas perkembangan kelembagaan, yayasan keagamaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan output kegiatan rapat internal antar Pemda dan lembaga keagamaan, mengevaluasi keberadaan eksistensi yayasan keagamaan.
8. Terlaksananya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dengan output kegiatan sosialisasi dan koordinasi tentang Halaqoh dan forum keagamaan.
 - b. Peningkatan kesadaran bela Negara dengan output terciptanya rasa patriotisme yang tinggi dari masyarakat.
 - c. Orientasi Pembauran bagi Pramuka dan pelajar dengan output kegiatan sosialisasi, pelatihan tenaga terlatih dalam forum Pembauran Kebangsaan di Kalangan Pelajar di daerah.
 - d. Pentas Seni dan budaya, Festival lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dengan mengadakan festival untuk menumbuh kembangkan budaya bangsa.
9. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan rincian kegiatan :
- a. Pembinaan dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penanggulangan bencana (Permnedagri



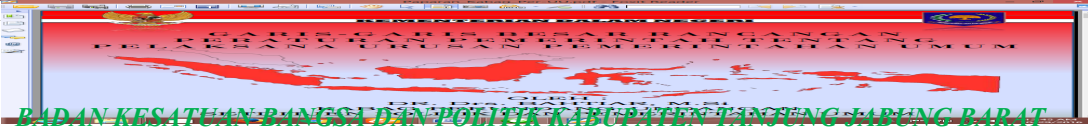
No.12 Tahun 2006) dengan output terwujudnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintah di bidang kewaspadaan dini.

10. Terlaksannya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dengan kegiatan :

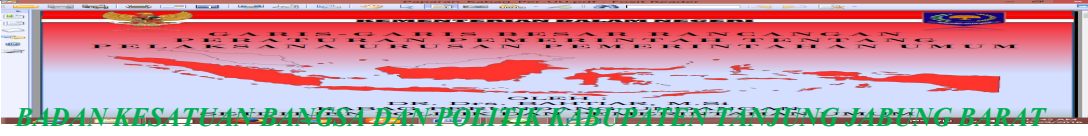
- a. Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan bersama SKB No.9/8 Tahun 2006. Dengan output Rapat koordinasi Peraturan bersama dengan outcomenya terlaksananya pendataan dan pelaporan permasalahan pelaksanaan peraturan bersama Mendagri dan Menag.

11. Peningkatan Politik Masyarakat dengan rincian kegiatan :

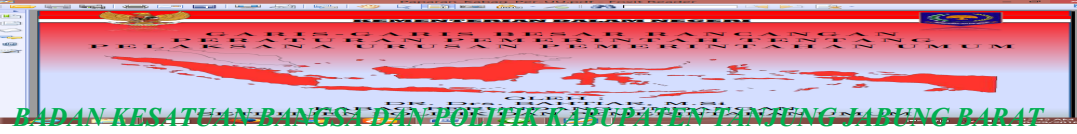
- a. koordinasi forum – forum diskusi politik dengan output terselenggaranya rapat koordinasi forum dengan melibatkan legislatife, Aparatur, KPU dan Panwaslu, TNI/Polri, Perguruan Tinggi dan Swasta.
- b. Penyusunan Database Partai Politik (Parpol/Ormas/OKP/LSM & Keagamaan) dengan terbentuknya tim penyusunan Database (Parpol/Ormas/OKP/LSM dan Kelembagaan perwakilan.
- c. Monitoring dan evaluasi Parpol, Ormas. OKP dan Lembaga Keagamaan/Perwakilan dengan output kegiatan terfasilitasinya usulan 15 ormas LSM baik perpanjangan pusat Provinsi untuk diikutsertakan dalam kerjasama kemitraan dalam rangka menunjang program kegiatan Dirjen kesbang Pol Kemendagri.
- d. Sosialisasi pemahaman budaya politik di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



- Dengan output kegiatan terkembangnya upaya – upaya pelestarian budaya daerah/adat daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- e. Monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan kelestarian budaya bangsa (Permendagri No.39 Tahun 2007) dengan output terpantaunya pembinaan pelestarian budaya bangsa di kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - f. Pemasyarakatan Undang – undang Politik dengan output kegiatan mensosialisasikan undang – undang politik ke Aparatur Pemerintah dan masyarakat.
 - g. Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dengan output kegiatan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pelaksanaan politik di daerah.
12. Terlaksananya Demokrasi yang makin kokoh dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a. Peningkatan kualitas proses politik dengan output kegiatan meningkatnya kualitas proses politik bagi lembaga Parpol di daerah.
 - b. Fasilitasi Pemilu Presiden , Legislatif dan Pemilukada serta pengembangan kualitas proses politik dengan output kegiatan terselenggaranya rapat koordinasi antar parpol, Panwaslu, KPU, Ormas, BEM, Legislatif terhadap pelaksanaan Pemilukada Bupati Tanjung Jabung Barat dan Wakil Bupi Tanjung Jabung Barat.
 - c. Peningkatan kapasitas kader Parpol dengan output kegiatan meningkatkannya pengembangan pembinaan kader parpol.



- d. Peningkatan sosialisasi komunikasi / diskusi politik tentang kebijakan pemerintah dalam tugas dan fungsi wakil rakyat di lembag perwakilan dengan output kegiatan forum diskusi tentang pemanjtapan pemahaman masyarakat dan lembaga parpol terhadap situasi politik dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



VISI : TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN MENUJU MASYARAKAT MADANI'			
Misi Ke I : Mewujudkan sistem kerja yang profesional yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas			
TUJUAN	SASRAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana untuk menunjang profesionalisme aparatur perencanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan keuangan yang efektif, 3. Terpenuhinya SDM untuk tenaga administrasi/ teknis perkantoran. 4. Terpenuhinya sarana prasarana perkantoran, 5. Tersedianya sumber daya aparatur yang mampu bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku 	Pengelolaan Administrasi umum dan keuangan yang baik dan akuntabel	Peningkatan pengetahuan melalui Bimtek yang memadai.
Misi Ke II : Mewujudkan iklim kehidupan di wilayah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang demokratis, dinamis, tentram dan damai yang ditopang oleh mantapnya wawasan kebangsaan, integritas dan ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama			
TUJUAN	SASRAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Memantapkan wawasan kebangsaan sebagai perekat dalam rangka memperkuat persatuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecah belahan bangsa (disintegrasi bangsa) 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara. 3. Memantapkan semangat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengamalan masyarakat tentang Ideologi bangsa dan Negara 2. Peningkatan pengetahuan



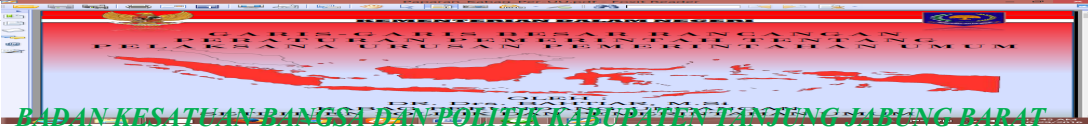
dan kesatuan bangsa.		nilai nilai sejarah kebangsaaan dan bela Negara	tentang Bela Negara 3. Penguatan Ekonomi, Sosial budaya masyarakat
----------------------	--	---	---

Misi Ke III :Meningkatnya pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat guna mengembangkan budaya politik yang demokratis melalui pemberdayaan lembaga infrastruktur politik			
TUJUAN	SASRAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya stabilitas politik yang dinamis dan kondusif bagi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan	Memelihara dan menghormati komunitas kehidupan politik masyarakat yang berorientasi pada pengembangan masyarakat Madani yang dicita – citakan	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban Politik sebagai Warga Negara	1.Peningkatan fungsi partai poli dalam Pendidikan Politik 2.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik 3.Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pemilu.
Misi Ke IV : Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat agar berperan serta dalam mengantisipasi, mencegah, terjadinya Gangguan dan Keamanan.			



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANJUNGPABUNG BARAT

TUJUAN	SASRAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya peran aktif dalam mengantisipasi, mencegah, terjadinya Gangguan dan keamanan dan kenyamanan lingkungan.	Meningkatnya pencegahan dini penanganan Gangguan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan upaya Deteksi Dini kerawanan Ipoleksosbudhankam 2. Meningkatkan kerukunan antar agama dan pemahaman pengamalan agama. 3. Meningkatkan peran lembaga lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan kerawanan Ipoleksosbudhankam melalui upaya deteksi Dini 2. Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik Interummat beragama maupun antar ummat beragama 3. Penguatan lembaga keagamaan
Misi Ke V : Mewujudkan pelatihan pengendalian dan kenyamanan lingkungan masyarakat.			
TUJUAN	SASRAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, damai, tentram dan bersatu	Terwujudnya Pengendalian keamanan dan Kenyamanan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerukunan antar Warga 2. Meningkatkan kerjasama antar warga dalam mengantisipasi terjadinya propaganda propaganda yang bermuatan negatif 3. Meningkatkan hubungan yang kondusif antar warga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengetahuan Warga tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Pendidikan tentang Nilai nilai sejarah dan kebangsaan 3. Peningkatan Pengetahuan Siskamling yang memadai



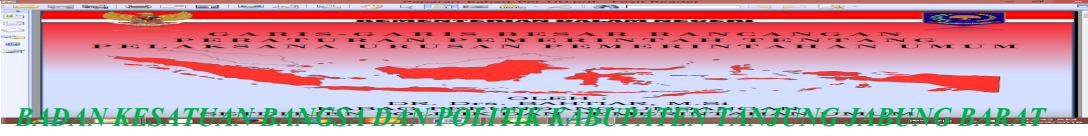
3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD

Penetapan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut adalah sebagai berikut :

Tugas : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Fungsi : Menyiapkan Rencana Strategis dan Akuntabilitas Kinerja Badan.

1. Melaksanakan semua program dan kegiatan badan sesuai lingkup tugas.
2. Merumuskan kebijakan dan Teknis lingkup Tugas
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan dan Kegiatan
4. Melaksanakan Tugas Dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.



BAB IV PENUTUP

Perubahan peraturan dan paradigma di bidang pemerintah dan pembangunan yang dilandasi dengan tekad yang kuat untuk melaksanakan demokratis, penegakan hukum dan berkeadilan membawa konsekuensi perlunya birokrasi pemerintah yang memiliki perencanaan yang professional , bersih, efektif , serta makin responsive dan akomodatif terhadap perubahan lingkungan.

Sebagai bagian protap dari rancangan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang seiring dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, ini disusun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

LUKMAN AZIS

PEMBINA

NIP 19580721 198803 1 001